

# LAPORAN KEGIATAN BADAN KOOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA (Periode Maret – Juni 2021)

Tahun Anggaran 2021

#### KATA PENGANTAR

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Bagian Humas dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), didalam Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum , maka tujuan dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia adalah memberikan nilai positif KPU se Indonesia didalam meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan diseluruh jajaran KPU se Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintah indonesia dan masyarakat pada umumnya melalui publikasi informasi di bidang informasi dan komunikasi serta hubungan masyarakat.

Di tahun 2021 ini, BAKOHUMAS KPU merancang dan melaksanakan program- program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ada sehingga terdapat sinkronisasi serta harmonisasi dalam mewujudkan visi dan misi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Program kerja yang direncanakan pada tahun 2021 terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan sesuai perencanaan maupun belum dilaksanakan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BAKOHUMAS KPU Kabupaten Kayong Utara (KPU KKU) pada tahun 2021 ini adalah mengikuti Rapat Koordinasi PPID dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Provinsi Kalimantan Barat (KPU Prov. Kalbar) pada tanggal 25 s.d 27 Maret 2021. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menyatukan visi dan persepsi para insan kehumasan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, sarana untuk sosialisasi kebijakan instansi anggota Bakohumas serta menjadi sarana knowledge sharing antar insan humas. Melalui kegiatan kehumasan seperti pelayanan informasi, peliputan, publikasi, penerimaan tamu maupun pengelolaan informasi dan komunikasi tersebut untuk menambah wawasan bagi pelaku kehumasan dalam menunjang tupoksinya, kegiatan ini juga merupakan suatu tahapan dalam menjalankan keterbukaan informasi public sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 14 tahun 2008.

Dengan dukungan serta koordinasi yang efektif dari semua unit kerja di KPU KKU diharapkan akan lebih mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja Bagian Humas dan Informasi KPU KKU di tahun-tahun mendatang.

> Hapuk dana, Juni 2021 Ketua,

J. J. J.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan sejak tahun 2010, undang-undang ini mensyaratkan adanya keterbukaan informasi kepada seluruh badan publik dan mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Sejalan dengan pelaksanaan UU KIP mengenai keterbukaan informasi, KPU RI telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana KPU mesti bertanggung jawab dalam pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kehumasan, publikasi, informasi, dan dokumentasi untuk mengemban amanat dalam pengelolaan Informasi dengan menunjuk personil-personil dilingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di wilayah kerjanya masing-masing.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, diamanatkan untuk membentuk BAKOHUMAS di KPU RI maupun Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia, yang keanggotaanya terdiri dari Komisioner dan pejabat-pejabat di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia.

Didalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BAKOHUMAS KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

 a. Pelaksanaan urusan kehumasan, publikasi, serta penyiapan dan pemberian layanan informasi di bidang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;

- b. Pengkoordinasian dan Pengelolaan data dan informasi baik secara internal maupun eksternal dengan berkoordinasi ke instansi/lembaga institusi pemerintah daerah dan pusat serta lembaga-lembaga lainnya yang bertugas mengelola pelayanan data dan informasi;
- c. Pengembangan teknologi informasi dan layanan informasi berbasis teknologi di BAKOHUMAS dengan pihak-pihak internal maupun eksternal;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang pemilu dan pemilihan serta demokrasi di wilayah kerjanya masing-masing.
- e. Pelaksanaan kesepahaman dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pengembangan dan pengelolaan informasi dan komunikasi yang lebih baik kedepannya.

Perlu disadari bahwa selama ini humas di lingkungan pemerintah termasuk di KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia belum melaksanakan peran kehumasanya secara optimal, sehingga pengelolaannya belum maksimal dan perlu mendapatkan pembinaan yang efektif, efisien dan produktif.

Ruang lingkup BAKOHUMAS KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, adalah :

- 1. Kegiatan yang dilaksanakan BAKOHUMAS KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia secara mekanisme dan prosedur mesti bekerjasama dengan pemangku kepentingan melalui metode penyampaian pesan dan penciptaan opini publik secara baik ;
- 2. Melaksanakan komunikasi positif di internal dan di eksternal secara terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan tertentu guna memperoleh manfaat bersama bagi lembaga dan pemangku kepentingan yang ada di KKU;

- 3. Kegiatan yang melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan;
- 4. Aktivitas dalam rangka membangun citra organisasi, pemerintah, bangsa dan negara.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan KPU mengenai peranan Humas di era reformasi Birokrasi sebagaimana dikutip dalam Warta BAKOHUMAS (Edisi 6/2013, halo 22), Kominfo antara lain:

- 1. Humas harus rnenjadi ujung tombak untuk membawa RB keluar dari kandang K/L dan daerah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat;
- 2. Reformasi Birokrasi bukanlah proyek dari pemerintah semata, tapi gerakan nasional bangsa Indonesia.
- 3. Harus ada strategi marketing sosial yang efektif untuk menjadi gerakan sosial yang efektif untuk menjadi gerakan nasional. Humas menjadi aktor pro aktif untuk membentuk opini publik agar terbentuk persepsi yang benar tentang RB. Karena harus kita akui masih banyak pihak yang ingin mendistorsi kebijakan public.
- 4. Setiap kebijakan publik harus pasti menimbulkan pro dan kontra, maka humas harus tahu siapa meraka. Humas juga harus paham apa yang dilakukan untuk memaksimalkan dukungan dan mengurangi resistensi. Resistensi itu muncul karena mispersepsi atau tidak paham, maka kita harus menumbuhkan dukungan yaitu yakinkan penenma manfaat mengerti bahwa mereka menikmati manfaat dari perubahan.
- 5. Humas haru dilibatkan dalam menyusun strategi implementasi kebijakan publik. Kita harus sadari humas pemerintah belum ditempatkan pada peran yang seharusnya yaitu memenangkan pertempuran dalam perang opini tentang kebijakan publik.
- 6. Persepsi aktor kehumasan tentang peran humas harus berubah. Humas itu aktif bukan defensive, pertahanan terbaik adalah menyerang. Oleh karena itu hubas sebaiknya rajin membentuk opini publik. Investasi pada kehumasan yang penting untuk dilakukan adalah peningkatan kapasitas actor, otoritas yang jelas dalam perang opini, wawasan kebijakan yang luas dan benar.

Berbicara tentang SDM Humas yang telah ada saat ini, BAKOHUMAS KPU KKU belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM sesuai dengan yang dibutuhkan. Kondisi saat ini Bagian BAKOHUMAS KPU KKU terdiri atas:

- 1. Ketua KPU KKU (1 orang) sebagai pembina Bakohumas
- 2. Anggota KPU KKU (4 orang) sebagai pembina Bakohumas
- 3. Sekretaris KPU KKU (1 orang) sebagai ketua Bakohumas
- 4. Sub. Koordinator yang membidangi pengelolaan Informasi (1 orang) sebagai ketua pelaksana Bakohumas
- 5. Staf PNS Kehumasan (2 orang) sebagai operator dan pelayanan
- 6. Staf PPNPN (1 orang) sebagai operator dan pelayanan

Dengan kondisi demikian diatas, maka pengelolaan Humas dan Informasi di KPU KKU tidak dapat berjalan dengan optimal jika tidak didukung oleh seluruh elemen yang ada di KPU KKU. Upaya yang dilaksanakan dalam pengelolaan Humas sampai saat ini adalah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan baik di KPU KKU maupun KPU RI, KPU Prov. Kalbar dan satker-satker yang ada di KKU. Selain itu pembinaan dan pendayagunaan terhadap BAKOHUMAS KPU KKU dirasa masih kurang optimal dilakukan.

Oleh karena itu perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan, dalam memberikan dukungan untuk pengembangan kemampuan SDM Humas baik yang dilaksanakan oleh KPU KKU itu sendiri maupun KPU RI, KPU Prov. Kalbar, tidak hanya kemampuan teknis namun juga substantif, karena Humas merupakan "corong" utama instansi dalam memberikan pelayanan publik dibidang informasi.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Menyadari akan pentingnya keberadaan BAKOHUMAS di KPU KKU dan belum optimalnya kegiatan di BAKOHUMAS KPU KKU serta perlunya "Knowledge Sharing" atau sharing pengetahuan antar kehumasan KPU Kabupaten/Kota se Kalbar dan disetiap instansi pemerintah daerah KKU, maka dalam kegiatan Manajemen Kehumasan dan Informasi KPU KKU dibagi menjadi 2 kegiatan besar antara lain sebagai berikut:

- 1. Mengikuti segala bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Forum Bakohumas KPU Kabupaten/Kota se Kalbar dan Instansi Pemerintah;
- 2. Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dan Layanan informasi dan komunikasi dengan baik melalui mekanisme berbasis teknologi.

Kedua kegiatan ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kehumasan di KPU KKU, dengan KPU Kabupaten/Kota se Kalbar dan instansi pemerintah yang ada di KKU?
- b. Bagaimana optimalisasi dan pemberdayaan para pejabat kehumasan yang ada di Bakohumas KPU KKU ?
- c. Pelaksanaan PPID KPU KKU sebagai amanat dari UU No 14 Tahun 2008.
- d. Bagaimana Peran dan fungsi kehumasan di KPU KKU sebagai salah satu instansi pemerintah?
- e. Regulasi dan inovasi baru di KPU KKU?
- f. Memperkenalkan kepada setiap instansi pemerintah mengenai inovasi baru di lingkungan KPU KKU.

#### C. RUANG LINGKUP

Kegiatan Bakohumas ditujukan untuk mengkoordinasikan fungsi kehumasan di instansi pemerintah dalarn bentuk memperkenalkan inovasi, regulasi baru dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi KPU melalui seminar, pelatihan, sharing pengetahuan dan diseminasi bagi para pejabat dan staf kehumasan diinstansi pemerintah.

Sedangkan, kegiatan Kehumasan dan layanan informasi merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh Bakohumas KPU KKU diantaranya mengikuti undangan kegiatan kehumasan baik sebagai peserta ataupun undangan liputan atau dokumentasi, menerima tamu, serta mengelola SDM, begitupun dengan layanan informasi.

#### D. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1. Menyamakan persepsi dan koordinasi tentang fungsi humas (pemerintah) dan informasi KPU;
- 2. Menyamakan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi BAKOHUMAS;
- 3. Menggali data dan informasi permasalahan pendayagunaan dan perlunya peningkatan kompetensi individu guna peningkatan kapasitas unit kehumasan dan publikasi.
- 4. Mengiringi perkembangan Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di KPU.
- 5. Mengelola informasi publik dalam wadah yang disebut PPID.
- 6. Menyelenggarakan kehumasan.

# E. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- 1. Terkordinasikan dan terciptanya persamaan persepsi tentang fungsi humas (pemerintah) dan publikasi KPU;
- 2. Terjadinya persamaan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi BAKOHUMAS;
- Tergalinya data dan informasi permasalahan pendayagunaan dan perlunya peningkatan kompetensi individu guna peningkatan kapasitas kehumasan dan informasi.
- 4. Terlaksananya pengelolaan informasi publik melalui PPID, serta proses kehumasan yang up to date/ terkini.

## F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah laporan pelaksanaan kegiatan konsolidasi fungsi kehumasan yang berisikan saran kebijakan kepada pimpinan dalam upaya pendayagunaan :

- 1.Peran kehumasan (pemerintah) di KPU KKU;
- 2. Jabatan Fungsional BAKOHUMAS (tugas pokok dan perannya), melalui peningkatan kompetensi individu;
- 3. Pelaksanaan pengumpulan informasi dan dokumentasi di KPU KKU.
- 4. Menambah pengetahuan dan wawasan kehumasan
- 5. Sarana knowledge sharing antar kehumasan instansi pemerintah

#### BAB II

#### METODE KEGIATAN

#### A. Forum Komunikasi Bakohumas

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran, BAKOHUMAS KPU KKU tidak menyelenggarakan Forum Komunikasi Bakohumas. Namun sebagai anggota, KPU KKU hanya menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian dan Lembaga anggota Forum Komunikasi Bakohumas serta berkoordinasi dengan instansi – instansi pemerintah yang ada di wilayah KKU.

## B. Kegiatan Kehumasan

Disamping mengikuti Forum Komunikasi Bakohumas, BAKOHUMAS juga mengadakan Kegiatan Kehumasan, dan tahun ini difokuskan dalam substansi yang bersifat strategis serta ditujukan sebagai upaya pelaksanaan peran dan fungsi PPID di KPU KKU yang telah diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, selain itu pula dibahas mengenai media publikasi pemerintah, dan pengelolaan website pemerintah, hal ini diharapkan dapat mendukung pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan dan pelayanan informasi ke seluruh *stakeholders* KPU.

Melaksanakan penerbitan media internal berupa Pemberitaan di website, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube yang menyajikan dan mengelola informasi kegiatan baik melalui website dan media social dengan konten beragam Aneka Informasi Kepemiluan maupun general yang diterbitkan setiap saat.

Secara keseluruhan kegiatan ini sharing informasi, pelayanan informasi, pengelolaan SDM, peliputan, dan publikasi kegiatan di KPU KKU, sharing dan diskusi antara BAKOHUMAS/praktisi humas dengan pejabat dari seluruh unit kerja KPU KKU, Penyelenggaraan PPID di KPU KKU, Pengkoordinasikan Website dan media sosial di KPU KKU, serta pelatihan dalam strategi membuat berita baik di website maupun di media internal.

#### **BAB III**

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kehumasan KPU KKU sudah dilaksanakan dibeberapa waktu yang lalu. Dan pada tahun 2021, kegiatan pelaksanaan kehumasan sudah berlangsung selama kurun waktu kurang lebih 6 (enam) bulan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Dimana tidak semua kegiatan BAKOHUMAS KPU KKU dapat diliput dan diikuti oleh Bagian Kehumasan dan Informasi mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi seperti ketersediaan anggaran dan jumlah SDM, namun demikian Bakohumas KPU KKU selalu berkegiatan dengan menggunakan pertimbangan tingkat kepentingan dan materi dari kegiatan yang dimaksud mesti dioptimalkan.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan kehumasan yang telah diliput dan diikuti dalam tahun anggaran 2021 ini antara lain :

A. Mengikuti Rapat Koordinasi PPID dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Prov. Kalbar

Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) KPU , adalah bentuk Koordinasi dan Kerjasama antar Humas sesame Lembaga KPU dengan Lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah, Lembaga Negara serta BUMN/BUMD. Sehingga Bakohumas KPU KKU sangat diperlukan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut untuk menciptakan sebuah media/wadah bagi kehumasan instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang berada dibawah naungan kementerian untuk membagikan informasi dan kebijakan baru yang sedang berkembang saat ini. Setiap instansi semestinya saling mensosialisasikan kebijakan instansinya termasuk KPU KKU, disamping itu kegiatan Komunikasi Bakohumas KPU KKU dibagi menjadi 3 model yaitu:

- Koordinasi Bakohumas antar Instansi Pemerintah Daerah maupun Pusat
- 2. Koordinasi Bakohumas sesama KPU Kabupaten/Kota se Prov. Kalbar
- 3. Koordinasi Bakohumas dengan KPU RI dan KPU se Indonesia

Bakohumas KPU KKU mengikuti Rapat Koordinasi PPID dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan layanan informasi publik di KPU Prov. Kalbar pada Tanggal 25-27 Maret 2021 di Pontianak bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan didalam pengelolaan dan penyajian informasi dan komunikasi di masing-masing satker KPU Kabupaten/Kota se Kalbar.

# Kegiatan Bakohumas KPU KKU Tahun 2021

NO	HARI/TGL	KEGIATAN	ТЕМРАТ	KET
1	25 s.d 27 Maret 2021	Rapat Koordinasi PPID dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan layanan informasi publik	KPU Prov. Kalbar	Meningkatkan dan memperbaiki dalam kualitas pengelolaan dan layanan informasi publik
2	Senin, 6 April 2021	Rapat Internal Koordinasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU KKU	Kantor KPU KKU	Berkoordinasi untuk pengembanga n pengelolaan PPID KPU KKU
3	Senin, 4 Mei 2021	Rapat Koordinasi Bakohumas KPU KKU dengan KPU RI	Secara daring	Mendapatkan instruksi agar peranan dan fungsi Kehumasan lebih dipertingkat lagi
4	Senin, 24 Mei 2021	Bakohumas KPU KKU berkoordinasi untuk membentuk kehumasan bersama Pemerintah Daerah KKU	Kantor Diskomi nfo KKU	Direspon positif oleh Gunawan (Kadis Diskominfo KKU)
5	Rabu, 27 Mei 2021	Bakohumas KPU KKU berkoordinasi untuk kegiatan	Kantor Badan Kesbang pol KKU	Direspon positif oleh Handi (Kabid Politik Badan Kesbangpol

		sosdiklih ( Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ) dengan Badan Kesbangpol KKU		KKU)
6	Rabu, 27 Mei 2021	Bakohumas KPU KKU berkoordinasi untuk kegiatan sosdiklih ( Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ) dengan Bagian Pemerintahan Desa KKU	Kantor Pemerin tahan Desa KKU	Direspon positif oleh Vika (Pegawai Bagian Pemerintahan Desa KKU)
7	Rabu, 2 Juni 2021	Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum dan Panduan Pengisian SAQ Monev Tahun 2021 dari Komisi Informasi Prov. Kalbar	Secara daring	Ditindaklanjut i dengan konsultasi dan pengisian form SAQ tersebut
8	Kamis, 3 Juni 2021	Rapat Internal terkait pengisian SAQ Monev Tahun 2021 dari Komisi Informasi Prov. Kalbar	Kantor KPU KKU	Ditindaklanjut i dengan konsultasi dan pengisian form SAQ tersebut
9	Kamis, 10 Juni 2021	Rapat Internal terkait Rakor Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Kantor KPU KKU	Ditindaklanjut i dengan penyampaian SPIP secara tepat waktu dan benar

# B. Kegiatan Kehumasan

Untuk menghadapi tantangan kinerja institusi pada situasi dan kondisi saat ini, di era yang penuh kompetisi, maka profesionalisme *public relations* harus dikembangkan terus menerus dalam rangka membangun citra organisasi maupun kelembagaan. Membangun citra bisa diaktualisasi dengan berbagai bentuk positif baik dalam meningkatkan pelayanan

maupun kualitas *profesionalisme public relations*. Melalui citra positif tersebut akan membangun rasa kebanggaan sehingga akan mendorong motivasi untuk berprestasi lebih baik lagi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan citra positif institusi, Bakohumas KPU KKU tahun 2021 menyelenggarakan kegiatan kehumasan secara aktif dan terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan kehumasan tersebut diantaranya pelaksanaan pelayanan informasi, pengelolaan SDM, penerimaan tamu, peliputan, publikasi dan pelaksanaan kehumasan lainnya.

Kegiatan ini mempunyai tujuan kegiatan antara lain:

- 1. Membangun, memelihara dan mengembangkan citra (image) yang positif bagi KPU KKU agar dapat diterima oleh masyarakat yakni pendapat umum yang bernilai positif bagi KPU KKU.
- 2. Membangun saling pengertian antara lembaga.
- 3. Meningkatkan pelayanan yang baik terhadap internal KPU KKU maupun eksternal.

#### **BAB IV**

#### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Manajemen Kehumasan dan Informasi Bakohumas KPU KKU dibagi menjadi 2 kegiatan besar yaitu Koordinasi Bakohumas dengan pihak lainnya dan Kegiatan Kehumasan KPU KKU, kedua kegiatan tersebut mempunyai peranan masing - masing dalam meningkatkan tugas dan fungsi kehumasan, kegiatan Bakohumas KPU KKU adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan insan humas, sedangkan Kegiatan kehumasan memiliki peran dalam membangun, memelihara dan mengembangkan citra (image) yang positif bagi KPU KKU agar dapat diterima oleh masyarakat.

Kegiatan Kehumasan KPU KKU merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk membentuk citra positif organisasi. Dengan terbentuknya citra positif organisasi, maka diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan peran dan kiprah unit kehumasan. Disamping memiliki tujuan dan sasaran khusus, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk evaluasi dan penilaian bagi pelaku humas di KPU KKU.

Dengan penyamaan visi dan misi pelaku Humas dan seluruh unit kerja yang ada di KPU terhadap perkembangan lingkungan strategis terutama terkait dengan isu "open government" dan reformasi birokrasi yang mensyaratkan adanya keterbukaan dan transparansi informasi publik, akuntabilitas kinerja, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, diharapkan akan terwujud kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan KPU.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pelaku kehumasan di KPU harus memiliki strategi kehumasan baru yang mengikuti perkembangan jaman, seperti pemanfaatan social media sebagai sarana informasi dan komunikasi disamping pengembangan dan pemutakhiran website KPU KKU yang telah ada, serta peningkatan kapasitas SDM humas untuk dapat membuat berita dengan judul/tagline yang menarik untuk dibaca.

## **B.SARAN**

Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat merupakan poin penting untuk diperhatikan terkait dengan publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik. Hal ini harus diingat terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, yang membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi dengan seluruh unit kerja di KPU dan diluar unit yang menjalankan fungsi kehumasan.

Partisipasi serta dukungan dari semua pihak terutama pimpinan bagi pelaku kehumasan juga merupakan poin penting agar tugas dan fungsi Humas dapat dijalankan secara optimal.

KABUPATEN KAYONG UTARA

# Lampiran Dokumentasi Kegiatan Bakohumas KPU KKU Periode Maret-Juni 2021









Ket. Foto : Rapat Internal Koordinasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU KKU (Senin, 6 April 2021)





Ket. Foto : Bakohumas KPU KKU berkoordinasi untuk membentuk kehumasan bersama Pemerintah Daerah KKU (Senin, 24 Mei 2021)





Ket. Foto : Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum dan Panduan Pengisian SAQ Monev Tahun 2021 dari Komisi Informasi Prov. Kalbar (Rabu, 2 Juni 2021)





Ket. Foto: Rapat Koordinasi Bakohumas KPU KKU dengan KPU RI (Senin, 4 Mei 2021)



Ket. Foto : Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum dan Panduan Pengisian SAQ Monev Tahun 2021 dari Komisi Informasi Prov. Kalbar



Ket. Foto : Rapat Internal terkait Rakor Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Kamis, 10 Juni 2021)